

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada masih menjadi permasalahan yang signifikan. Untuk wilayah Jawa Timur data yang dikeluarkan dari KPU provinsi Jawa Timur sebanyak 70,06% dengan pengguna hak pilih mencapai 21.937.202 suara. Suara sah tercatat sebanyak 20.732.562 dan suara tidak sah sebanyak 1.204.640 suara (kpu jatim, 2024). Sedangkan untuk kabupaten Tulungagung Data dari KPU Tulungagung sebanyak 71%. Beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi ini meliputi kurangnya informasi yang akurat mengenai pemilu, apatisme masyarakat terhadap politik, serta ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan yang sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dari semua pihak, terutama dari KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

**Tabel 1**  
(perbandingan data pilkada 2024 dari pilkada sebelumnya)

	2008	2013	2018	2024
Pilihan Gubernur	59,21%	50,66%	73,52%	71,17%
Pilihan Bupati	66,05%	66,26%	73,50%	71,13%

sumber : olahan data peneliti

Keberadaan sosial media di sebuah lembaga memberikan kemudahan bagi lembaga. KPU memanfaatkan sosial media salah satunya sebagai sarana memberikan informasi yang bisa langsung dan mudah dipahami (Sudiono,2022).

Komunikasi media menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi permasalahan ini. KPU memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat mengenai proses Pilkada, mengapa pemilihan ini penting, dan bagaimana cara berpartisipasi dengan baik. Dalam hal ini, media berpengelolaan sebagai saluran untuk menyampaikan informasi, membangun pemahaman, dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka. Komunikasi yang efektif tidak hanya memberikan informasi yang dibutuhkan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

Konten yang ada di media sosial KPU Tulungagung, khususnya Instagram, memberikan dampak positif terhadap masyarakat dari berbagai kalangan yang mengakses akun tersebut. Sebagai contoh, pada pelaksanaan Pilkada 2024, masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui pasangan calon Bupati Tulungagung dapat dengan mudah memperoleh informasi hanya dengan mengakses media sosial resmi KPU Tulungagung. Informasi yang disampaikan melalui visual dan caption yang informatif memudahkan publik untuk memahami isi pesan secara cepat. Namun demikian, meskipun konten-konten yang disajikan cukup informatif, sayangnya tidak mendapatkan respons atau interaksi yang signifikan dari masyarakat. Masyarakat cenderung hanya melihat kontennya tanpa memberikan komentar, menyukai, atau membagikan unggahan tersebut. Hal ini mengakibatkan rendahnya persentase pada media sosial KPU Tulungagung, sehingga efektivitas komunikasi digital yang dibangun belum sepenuhnya optimal dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat secara

daring. Hal ini ditambah tidak adanya sosialisasi mengenai medsos KPU Tulungagung.

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memengaruhi cara masyarakat menerima informasi. Media sosial dan platform digital lainnya semakin mendominasi cara komunikasi masyarakat. KPU Tulungagung, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, perlu memanfaatkan berbagai saluran komunikasi ini untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Sebuah penelitian oleh Smith (2020) menunjukkan bahwa kampanye melalui media sosial dapat meningkatkan keterlibatan pemilih, terutama di kalangan generasi muda yang lebih aktif menggunakan platform digital. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi politik secara cepat dan luas, menghubungkan pengguna di daerah pedesaan dengan berita dan diskusi politik yang mungkin tidak mudah diakses melalui media tradisional. Platform media sosial menyediakan ruang bagi pengguna untuk berinteraksi, berdiskusi, dan berbagi pandangan politik, yang dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam proses politik. (Zainudin, 2024)

Namun, ada tantangan yang dihadapi dalam penggunaan media untuk meningkatkan partisipasi. Penyebaran informasi yang salah atau hoaks dapat menyesatkan masyarakat dan mengurangi kepercayaan terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, KPU harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, transparan, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ini termasuk penyampaian informasi tentang tahapan pemilihan, pemungutan suara, dan cara untuk berpartisipasi dengan benar.

Berdasarkan hasil pra riset observasi Masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses sosialisasi pemilu. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan pemuda dalam kampanye komunikasi. Pendekatan ini dapat menciptakan rasa kepemilikan di kalangan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka memiliki pengelolaan dalam proses pemilihan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi.

Evaluasi terhadap strategi komunikasi yang telah di terapkan oleh KPU Tulungagung merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui evaluasi yang dilakukan KPU Tulungagung dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari pendekatan yang digunakan, serta mengembangkan inovasi yang baru untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Dengan melakukan evaluasi dan implementasi hasilnya secara sistematis, KPU Tulungagung dapat meningkatkan efektivitas strateginya, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan dapat meningkatkan partisipasi pemilu ataupun pilkada. Misalnya, penggunaan infografis, video edukasi, dan konten interaktif dapat menjadi alternatif yang menarik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama di era digital saat ini.

KPU Tulungagung melakukan evaluasi pengelolaan media sosial hanya sebatas pada rekap jumlah konten setiap tahunnya. Tidak ada evaluasi mendalam yang melibatkan staf secara keseluruhan untuk membahas kualitas, efektivitas

pesan, atau strategi komunikasi yang telah dijalankan. Evaluasi yang dilakukan bersifat administratif semata, tanpa adanya diskusi evaluatif yang menyeluruh. Rekapitulasi jumlah konten yang telah di posting kemudian diserahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari penilaian untuk pemberian reward atas pengelolaan media sosial. Namun, indikator penilaian dari KPU Jatim hanya berfokus pada kuantitas unggahan di masing-masing akun KPU kabupaten/kota, tanpa mempertimbangkan aspek kualitas atau dampak komunikasi yang ditimbulkan dari konten tersebut.

KPU Tulungagung tidak memiliki perencanaan konten yang disusun setiap bulannya untuk media sosial. Hingga sekarang, tidak ada kalender konten atau strategi komunikasi yang dirancang sebelumnya untuk mengatur waktu upload, maupun tujuan dari setiap unggahan di platform medsos KPU Tulungagung . Tetapi, setiap kali terdapat kegiatan, momen penting, atau ucapan resmi, konten harus segera dibuat dan diunggah pada hari yang sama. Hal ini dilakukan atas dasar instruksi langsung, tanpa adanya proses perencanaan atau persiapan yang matang sebelumnya. Akibatnya, pengelolaan media sosial cenderung bersifat langsung dan memberatkan pengerjaan dan biasanya sehari 2-3 pembuatan ucapan atau yang lain sehingga memberatkan

Dalam konteks ini, penting bagi KPU Tulungagung untuk memperkuat kolaborasi dengan media massa. Media memiliki pengelolaan strategis dalam menyebarkan informasi yang relevan dan menarik perhatian masyarakat. Dengan menjalin kemitraan yang baik, KPU dapat memanfaatkan saluran media yang ada untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau lebih banyak pemilih.

Berdasarkan berbagai tantangan dan potensi yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan komunikasi media oleh KPU Tulungagung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024. Penelitian ini akan mengeksplorasi strategi komunikasi yang diterapkan, efektivitas media yang digunakan, serta kendala yang dihadapi dalam sosialisasi pemilu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi KPU dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif di masa mendatang, sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat.

Sebagai kesimpulan, pengelolaan komunikasi media dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 sangat penting. KPU Tulungagung harus mampu merumuskan strategi komunikasi yang tepat dan efektif untuk menjangkau masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai saluran media, melibatkan masyarakat, dan memastikan keakuratan informasi, diharapkan partisipasi pemilih dapat meningkat. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam mengenai isu ini dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya serta bagi pengambilan keputusan KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan berfokus pada beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan medsos KPU Tulungagung ?
2. Bagaimana evaluasi pengelolaan medsos KPU Tulungagung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan medsos KPU Tulungagung
2. Untuk mengetahui dampak pengelolaan terhadap masyarakat
3. Untuk mengetahui evaluasi terkait pengelolaan medsos KPU Tulungagung

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a) Memberikan kontribusi pada kajian komunikasi politik, khususnya dalam konteks pemilihan umum di tingkat lokal.
  - b) Menambah literatur akademis mengenai pengelolaan komunikasi media dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
2. Manfaat Praktis:
  - a) Memberikan masukan yang dapat digunakan KPU Tulungagung untuk mengevaluasi dan mengembangkan strategi komunikasi media yang lebih efektif dalam pemilihan umum.
  - b) Memberikan rekomendasi bagi lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu untuk menerapkan strategi komunikasi yang lebih tepat.

### **E. Penegasan Istilah**

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam konteks pemilihan umum (pemilu) merujuk pada keterlibatan aktif warga negara dalam seluruh tahapan proses demokrasi (Nurminingsih, 2024). Hal ini mencakup tidak hanya kehadiran di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suara, tetapi juga pengelolaan serta dalam kegiatan seperti sosialisasi, kampanye, pengawasan jalannya pemilu, hingga pelaporan pelanggaran yang terjadi. Partisipasi ini merupakan indikator penting dari kualitas demokrasi, karena mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap proses politik di negaranya. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat kehadiran saat pemungutan suara, tetapi juga dari keterlibatan dalam berbagai tahapan pemilu lainnya (Perdana et al., 2024).

Lebih dari sekadar hak, partisipasi dalam pemilu adalah bentuk kontribusi nyata warga negara dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan di masa depan. Dengan berpartisipasi, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi, memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai dan harapan mereka, serta turut mengawasi jalannya pemerintahan. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap sistem demokrasi, sementara partisipasi yang rendah bisa menjadi indikator adanya ketidakpuasan atau apatisme politik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat sangat penting dalam memperkuat legitimasi dan efektivitas pemerintahan yang demokratis.

## 2. Apatisme Politik

Apatisme politik adalah sikap ketidakpedulian atau acuh tak acuh terhadap urusan politik dan pemerintahan. Individu yang mengalami apatisme politik cenderung tidak tertarik untuk mengikuti perkembangan politik, tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, dan enggan terlibat dalam diskusi atau aktivitas politik lainnya (Pelu, 2023). Sikap ini sering kali muncul akibat kekecewaan terhadap sistem politik yang dianggap korup, tidak transparan, atau tidak mampu mewakili kepentingan rakyat. Selain itu, kurangnya pendidikan politik dan minimnya kepercayaan terhadap institusi politik juga menjadi faktor penyebab apatisme politik.

Apatisme politik memiliki dampak negatif terhadap kualitas demokrasi. Ketika sebagian besar masyarakat bersikap apatis, partisipasi dalam proses demokrasi menurun, yang pada akhirnya dapat mengurangi legitimasi pemerintah yang terpilih. Kondisi ini juga dapat menghambat upaya reformasi dan perubahan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Untuk mengatasi apatisme politik, diperlukan upaya peningkatan pendidikan politik, transparansi dalam pemerintahan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik. Khususnya bagi generasi muda, pendekatan yang relevan dan komunikatif sangat penting

untuk membangkitkan minat dan partisipasi mereka dalam dunia politik (Ibr, 2024).